
Pemetaan Cakupan Pengguna Kb Aktif Dan *Unmet Need* Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Bella Dwi Saputri⁽¹⁾, Diah Indriani⁽²⁾

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur, 60115 Indonesia

¹ bella.dwi.saputri-2018@fkm.unair.ac.id

² diah-i@fkm.unair.ac.id

ABSTRAK

Keluarga Berencana bertujuan untuk mengontrol jumlah penduduk dengan membatasi jumlah anak setiap keluarga untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Program tersebut dilakukan dengan menghimbau Pasangan usia subur untuk menggunakan metode atau alat kontrasepsi sesuai kebutuhan dan keinginan. Pada tahun 2021, Kabupaten Ponorogo mengalami penurunan cakupan pengguna keluarga berencana aktif (Pasangan Usia Subur yang sedang menggunakan alat kontrasepsi) sekaligus peningkatan prevalensi *unmet need* (Pasangan Usia Subur yang kebutuhan berkeluarga berencananya belum terpenuhi). Sistem Informasi Geografi merupakan ilmu yang mempelajari pembuatan peta secara komputasi atau biasa disebut dengan pemetaan. Pemetaan dilakukan untuk memantau capaian cakupan pengguna keluarga berencana aktif dan *unmet need* setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggambarkan pengguna keluarga berencana aktif dan *unmet need* di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang selanjutnya akan dianalisis secara spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 kecamatan yang memiliki cakupan pengguna keluarga berencana aktif dibawah capaian Kabupaten Ponorogo dan terdapat 9 kecamatan dengan prevalensi *unmet need* diatas capaian Kabupaten Ponorogo. Metode kontrasepsi yang paling diminati oleh masyarakat Kabupaten Ponorogo adalah suntik. Analisis kluster berdasarkan cakupan KB Aktif dan *unmet need* membagi Kabupaten Ponorogo menjadi 4 kluster. Hasil pemetaan yang telah dilakukan, dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan keberhasilan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Ponorogo.

Kata Kunci: Keluarga Berencana, Pengguna Keluarga Berencana Aktif, *Unmet Need*, Pemetaan

ABSTRACT

Family Planning aims to control the population with limiting number of children in family to achieve family welfare. This program encouraging couples of childbearing age to use contraceptive methods or devices according to their needs and desires. In 2021, Ponorogo had a decrease of active family planning participants and an increase of prevalence unmet need (couple of childbearing age who need contraception but do not use contraception). Geographic Information System is a science that studies map making computationally or commonly called mapping. The mapping can used to monitor coverage of active family planning participants and prevalence unmet need of each sub-district. This study is a descriptive study that describes active family planning participants and unmet need in Ponorogo Regency. This study uses secondary data which will be analyzed spatially. The results showed that there were 4 sub-districts that had active family planning participant below the district's achievement and 9 sub-districts with the prevalence of unmet need above the district's achievement. Injection is the method of contraception that the people of Ponorogo Regency are most interested. Cluster analysis based on active family planning coverage and unmet need divided Ponorogo Regency into 4 clusters.. The results of this study can be taken into consideration to increase the success of Family Planning Program in Ponorogo Regency.

Keywords: Family Planning, Active Family Planning Participants, *Unmet Need*, Mapping

1. PENDAHULUAN

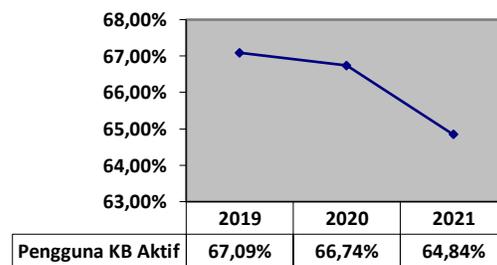
Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk pada setiap tahunnya. Penduduk Indonesia pada tahun 2021 mencapai 272,30 juta jiwa (Dirjendukcapil, 2021). Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 yaitu sebanyak 270,20 juta jiwa (BPS, 2020). Pulau Jawa menjadi pulau dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia dengan jumlah penduduk yang berada di provinsi Jawa Timur mencapai 40,67 juta jiwa pada tahun 2020. Jumlah penduduk pada tahun 2020 ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu 39,5 juta pada tahun 2018 dan 39,70 juta jiwa pada tahun 2019 (BPS Provinsi Jawa Timur, 2021). Kabupaten Ponorogo juga mengalami kenaikan jumlah penduduk pada setiap tahunnya. Sebanyak 870.705 jiwa terdapat di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018, lalu meningkat menjadi 871.370 jiwa pada tahun 2019 dan kembali meningkat menjadi 949.318 pada tahun 2020 (BPS Provinsi Jawa Timur, 2020).

Kenaikan penduduk yang terjadi setiap tahun di Kabupaten Ponorogo dapat menyebabkan tingginya jumlah penduduk sehingga akan menimbulkan masalah kepadatan penduduk. Selain itu, banyaknya jumlah penduduk juga dapat menyebabkan munculnya berbagai masalah kesehatan yang terjadi di dalam keluarga dan tentunya akan mengancam kesejahteraan keluarga. Kenaikan jumlah penduduk pada setiap tahun ini tentu perlu menjadi perhatian khusus utamanya bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo sehingga harus dilakukan upaya untuk mengontrol jumlah penduduk di Kabupaten Ponorogo. Program KB merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam usaha mengontrol jumlah penduduk.

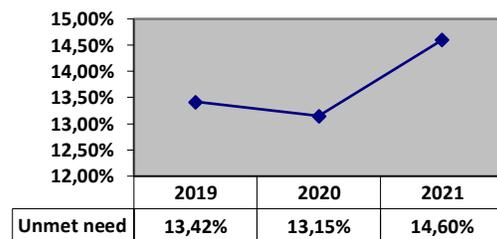
Program Keluarga Berencana merupakan upaya dalam membatasi jumlah anak setiap keluarga agar tercapai kesejahteraan dalam keluarga (Matahari et al., 2018). Beberapa indikator yang berperan untuk menunjukkan keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Berencana di suatu wilayah diantaranya adalah *Total Fertility Rate* (TFR) dan Laju pertumbuhan penduduk (LPP). TFR merupakan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh setiap wanita selama masa subur berlangsung (BPS, 2022). LPP merupakan angka yang menunjukkan rata-rata tingkat kenaikan jumlah penduduk per tahun pada suatu wilayah dan dalam jangka waktu tertentu (BPS, 2021). Laju pertumbuhan penduduk dan *Total Fertility Rate* yang ada di suatu wilayah dipengaruhi oleh banyak aspek, salah satunya dipengaruhi oleh jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang berpartisipasi

dalam Program Keluarga Berencana (KB). Keterlibatan masyarakat dalam Program Keluarga Berencana dapat membantu menurunkan jumlah penduduk di suatu wilayah. Cakupan pengguna KB Aktif pada setiap wilayah dapat mengindikasikan keberhasilan program KB di wilayah tersebut. Pengguna KB Aktif merupakan pengguna KB yang saat ini sedang menggunakan kontrasepsi dengan tujuan menunda kehamilan, mengatur atau menjarangkan kehamilan, atau mengakhiri kesuburan. Pengguna KB Aktif dapat menggunakan jenis alat atau obat kontrasepsi yang tersedia diantaranya adalah suntik, pil, kondom, implan, Metode Operasi Wanita (MOW), Metode Operasi Pria (MOP), dan *Intrauterine Device* (IUD). Pemilihan jenis alat atau obat kontrasepsi ini disesuaikan dengan tujuan lama penggunaan alat atau obat kontrasepsi. PUS dapat memilih jenis kontrasepsi sesuai keinginan baik jenis kontrasepsi metode jangka panjang maupun jangka pendek.

Berikut terdapat data yang menunjukkan bahwa cakupan pengguna KB Aktif di Kabupaten Ponorogo mengalami penurunan dan prevalensi *unmet need* (PUS yang membutuhkan kontrasepsi namun tidak menggunakan kontrasepsi) mengalami peningkatan.



Gambar 1. Grafik presentase pengguna kb aktif



Gambar 2. Presentase *unmet need* di kab.ponorogo

Berdasarkan grafik diatas, pada tahun 2019 cakupan pengguna KB Aktif di Kabupaten Ponorogo sebanyak 67,09% atau 114.704 pengguna KB Aktif. Pada tahun 2020, cakupan pengguna KB Aktif di Kabupaten Ponorogo menurun menjadi 66,74% atau 114.760 pengguna. Pada tahun 2021, cakupan

pengguna KB Aktif di Kabupaten Ponorogo kembali mengalami penurunan menjadi 64,84% atau 110.959 pengguna.

Selain presentase kepesertaan KB aktif, persentase *unmet need* juga digunakan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan Program KB.. *Unmet need* merupakan kebutuhan KB yang belum terpenuhi atau dengan kata lain *unmet need* terjadi ketika keinginan atau kebutuhan PUS untuk menggunakan alat atau obat kontrasepsi namun belum terpenuhi sehingga PUS tersebut memutuskan untuk tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi. Data Laporan Statistika Rutin menunjukkan bahwa prevalensi kejadian *unmet need* di Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir yaitu sebagai berikut. Prevalensi *unmet need* di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021 mencapai 14,60%. Prevalensi ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yaitu sebanyak 13,15% kejadian *unmet need*.

Penurunan cakupan pengguna KB Aktif dan peningkatan prevalensi *unmet need* di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021 menjadi salah satu indikator bahwa Program Keluarga Berencana belum berjalan secara maksimal. Oleh karenanya dapat dilakukan sebuah pemetaan yang bertujuan untuk memantau perkembangan pelaksanaan Program Keluarga Berencana pada setiap wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Pemetaan ini merupakan pengaplikasian Sistem Informasi Geografis (SIG) yaitu ilmu yang mempelajari mengenai pembuatan peta secara komputasi dengan tahapan meliputi input, proses, serta output (Sugaadi et al., 2009). Artikel ini bertujuan untuk membuat pemetaan mengenai capaian cakupan pengguna KB Aktif dan pemetaan prevalensi *unmet need* pada setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021. Selain itu, akan dilakukan pemetaan hasil pengklusteran berdasarkan cakupan KB Aktif dan prevalensi *unmet need*. Hasil pemetaan ini dapat digunakan sebagai alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan cakupan KB Aktif yang rendah dan prevalensi *unmet need* yang tinggi pada suatu wilayah di kecamatan Kabupaten Ponorogo.

2. METODE PENELITIAN

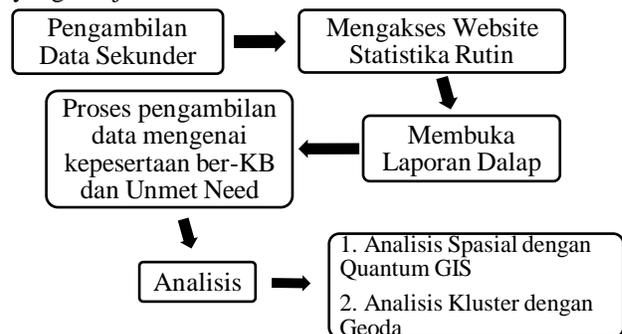
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dimana penelitian ini akan menggambarkan objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah cakupan pengguna KB Aktif dan *unmet need* di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan jenis data sekunder dari Laporan Statistika Rutin. Laporan ini menyediakan informasi mengenai pencapaian

program KB secara nasional. Pencatatan dan pelaporan data dalam laporan ini rutin dilakukan setiap tahun dan dipublikasikan setiap bulan dan setiap tahun. Laporan Statistika Rutin tersedia dalam aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui situs <https://aplikasi.bkkbn.go.id>.

Laporan yang terdapat di dalam Laporan Statistika Rutin terbagi menjadi 2 yaitu Laporan Pengendalian Lapangan (Laporan Dalap) dan Laporan Pelayanan Kontrasepsi (Laporan Pelkon). Laporan Dalap merupakan laporan hasil pencatatan dan pelaporan kegiatan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan Program KB di lapangan. Laporan Dalap merupakan laporan yang alur penginputan datanya dilakukan oleh penyuluh keluarga berencana (PKB) pada setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Ponorogo. Sedangkan Laporan Pelkon merupakan laporan hasil pencatatan dan pelaporan yang berkaitan dengan pelayanan kontrasepsi dan dilakukan oleh fasilitas kesehatan pada setiap wilayah seperti klinik KB, dan dokter/bidan praktek swasta. Laporan Pelkon merupakan laporan yang penginputan datanya dilakukan oleh setiap fasilitas kesehatan yang terdapat di setiap wilayah di Kabupaten Ponorogo. Data yang akan digunakan adalah data dalam Laporan Dalap yaitu mengenai pengguna KB Aktif berdasarkan jenis metode kontrasepsi dan data mengenai pasangan usia subur bukan pengguna KB (BKKBN, 2021).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan *software* Quantum GIS dan Geoda. Metode pengukuran pada penelitian ini berupa pengklasifikasian warna pada peta. Pengklasifikasian warna untuk pemetaan cakupan pengguna KB Aktif dan prevalensi *unmet need* terbagi menjadi 2 yaitu warna merah untuk wilayah yang tidak berhasil memenuhi standar capaian kabupaten dan warna kuning untuk wilayah yang berhasil memenuhi standar capaian kabupaten. Sedangkan untuk pemetaan hasil pengklusteran akan terbagi menjadi 4 yaitu warna kuning untuk kluster 1, warna biru untuk kluster 2, warna hijau untuk kluster 3, dan warna merah untuk kluster 4.

Berikut merupakan ringkasan alur penelitian yang disajikan dalam bentuk flowchart:



Gambar 3. Flowchart Alur Penelitian

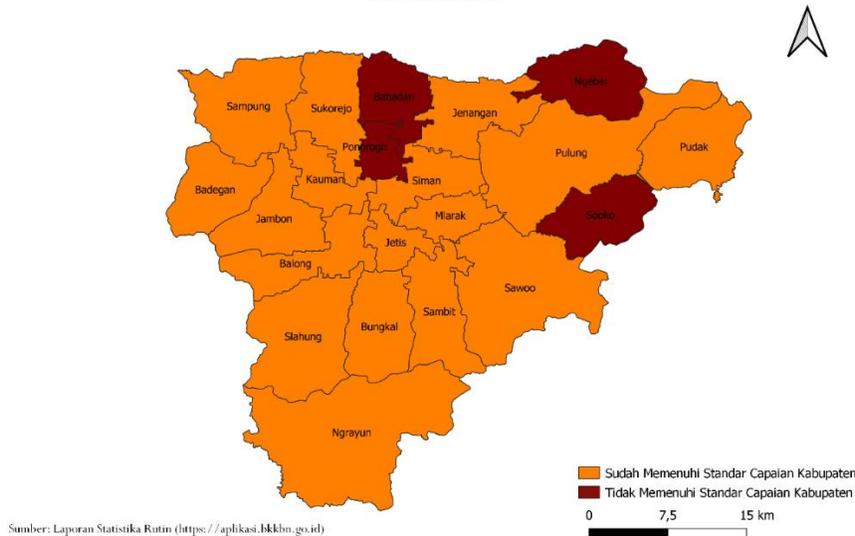
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Data sekunder yang bersumber dari Laporan Statistika Rutin selanjutnya akan dilakukan pengolahan data sekaligus analisis data. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software

Quantum GIS dan Geoda *filtering* dan *cleaning* data sehingga menghasilkan data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Berikut merupakan data yang telah dilakukan proses *filter* dan *Cleaning* (Tabel 1):

PEMETAAN CAPAIAN CAKUPAN KB AKTIF TIAP KECAMATAN DI KABUPATEN PONOROGO
Bulan Desember 2021



Gambar 4. Pemetaan Cakupan KB Aktif

1. Pemetaan Capaian Cakupan KB Aktif

Capaian Cakupan KB Aktif Kabupaten Ponorogo pada bulan Desember 2021 mencapai 64,84%. Dari hasil pemetaan yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa terdapat 4 kecamatan yang tidak memenuhi standar capaian kabupaten yaitu memiliki cakupan KB Aktif dibawah 64,84%. 4 kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Ngebel, Babadan, Ponorogo, dan Kecamatan Sooko. Sedangkan 17 kecamatan yang lain yaitu Kec. Badegan, Kec. Bungal, Balong, Jambon, Jetis, Jenangan, Mlarak, Kauman, Ngrayun, Pudak, Pulung, Sambit, Sampung, Sawoo, Siman, Slahung, dan Sukorejo sudah memenuhi standar capaian kabupaten yaitu memiliki capaian cakupan KB Aktif diatas 64,84%.

Pengguna KB Aktif yang terdapat di Kabupaten Ponorogo menggunakan jenis metode kontrasepsi yang beragam. Jenis metode kontrasepsi jangka pendek (non MKJP) yang dapat digunakan diantaranya adalah pil, kondom, dan suntik. Sedangkan jenis kontrasepsi yang tergolong MKJP

yang dapat digunakan diantaranya adalah IUD, MOW, MOP dan implan.

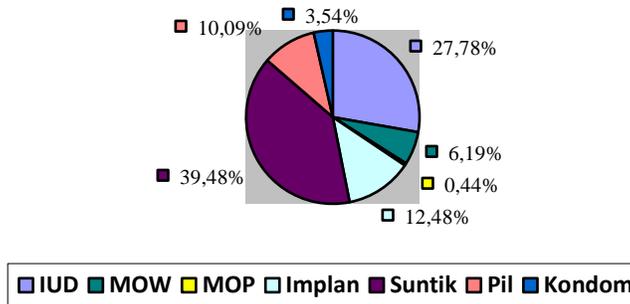
Berdasarkan grafik pengguna KB Aktif per metode kontrasepsi (Gambar 5), jenis alkon yang paling banyak dipakai dan diminati Kabupaten Ponorogo adalah jenis alkon suntik dengan prevalensi pengguna jenis metode ini sebanyak 39,48%. Sedangkan jenis metode kontrasepsi yang masih jarang dipakai adalah MOP dengan prevalensi 0,44% dan kondom dengan prevalensi 3,54%. Sedangkan untuk metode kontrasepsi yang lain yaitu MOW dengan prevalensi 6,19%, pil dengan prevalensi 10,09%, implan dengan prevalensi 12,48%, dan IUD dengan prevalensi 27,78%.

Tabel 1. Data Hasil *Filtering* dan *Cleaning*

Kecamatan	Jumlah PUS	KB Aktif	% KB Aktif	Unmet Need			% Unmet Need	IUD	MOW	MOP	IMPLAN	SUNTIK	PIL	KONDOM	%MKJP	%Non MKJP
				Ingin anak ditunda	Tidak ingin anak lagi	Total										
Babadan	10.797	6163	57,08	538	354	892	8,26	1854	352	8	258	2846	556	289	40,11	59,89
Badegan	5.921	3932	66,41	582	632	1.214	20,50	649	218	6	708	2028	240	83	40,21	59,79
Balong	8.363	5570	66,60	468	849	1.317	15,75	1994	143	36	641	2317	346	93	50,52	49,48
Bungkal	7.107	4767	67,07	313	388	701	9,86	1850	315	19	821	1188	314	260	63,04	36,96
Jambon	9.113	6157	67,56	808	701	1.509	16,56	1032	196	39	958	3262	494	176	36,14	63,86
Jenangan	11.102	7271	65,49	878	1.126	2.004	18,05	812	542	13	632	3362	1572	338	27,49	72,51
Jetis	5.792	3878	66,95	373	359	732	12,64	440	286	5	314	1814	840	179	26,95	73,05
Kauman	7.515	4938	65,71	661	751	1.412	18,79	1923	317	9	552	1583	376	178	56,72	43,28
Mlarak	5.579	3758	67,36	265	254	519	9,30	998	177	7	403	1803	246	124	42,18	57,82
Ngebel	3.761	2366	62,91	437	408	845	22,47	454	146	20	592	585	448	121	51,23	48,77
Ngrayun	10.426	6937	66,54	531	522	1.053	10,10	1349	515	69	265	3679	1020	40	31,69	68,31
Ponorogo	10.720	4773	44,52	788	3.546	4.334	40,43	2148	599	10	247	1297	300	172	62,94	37,06
Pudak	2.115	1450	68,56	76	321	397	18,77	317	109	18	497	434	75	0	64,90	35,10
Pulung	11.451	7841	68,47	506	579	1.085	9,48	1873	660	81	1492	2903	550	282	52,37	47,63
Sambit	8.860	5974	67,43	635	496	1.131	12,77	1535	337	3	766	1896	1061	376	44,21	55,79
Sampung	7.085	4744	66,96	348	257	605	8,54	1454	272	3	384	2161	380	90	44,54	55,46
Sawoo	11.245	7455	66,30	597	680	1.277	11,36	2466	498	20	813	2729	665	264	50,93	49,07
Siman	8.691	6032	69,41	217	244	461	5,30	2988	338	19	580	1543	357	207	65,07	34,93
Slahung	10.484	7105	67,77	560	485	1.045	9,97	2295	375	22	1152	2581	544	136	54,10	45,90
Sooko	4.735	3068	64,79	250	156	406	8,57	375	172	71	812	1418	162	58	46,61	53,39
Sukorejo	10.099	6780	67,14	994	1.087	2.081	20,61	2022	296	10	961	2382	647	462	48,51	51,49

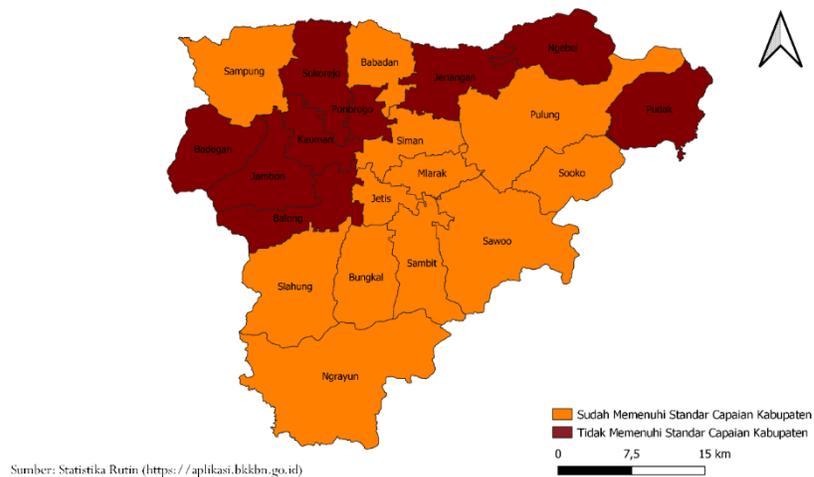
Data yang telah diolah selanjutnya dilakukan analisis spasial dan analisis kluster menggunakan *software* Quantum GIS dan Geoda dengan hasil sebagai berikut.

Presentase Penggunaan Alat/Obat Kontrasepsi



Gambar 5. Presentase Pengguna KB Aktif berdasar Alat/Obat kontrasepsi

2. Pemetaan Prevalensi *Unmet Need*



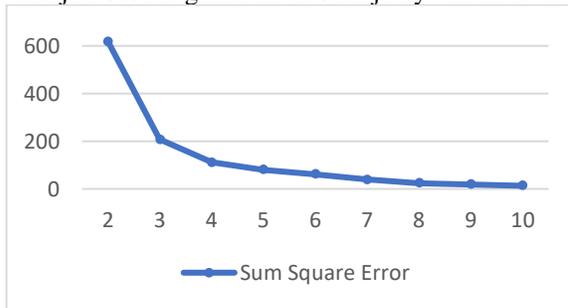
Gambar 6. Pemetaan Prevalensi *Unmet Need* Tiap Kecamatan di Kabupaten Ponorogo

Capaian prevalensi *unmet need* di Kabupaten Ponorogo pada bulan Desember 2021 mencapai 14,60%. Dari hasil pemetaan yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa terdapat 9 kecamatan yang tidak memenuhi standar capaian kabupaten yaitu memiliki prevalensi *unmet need* diatas 14,60% yaitu Kecamatan Puduk, Ponorogo, Ngebel , Kauman Jenangan, Sukorejo, , Jambon, Balong, dan Badegan. Sedangkan 12 kecamatan yang lain yaitu Kec. Babadan, Sawoo Pulung Siman, Jetis, , Sambit, Bungkal, Slahung, Ngrayun, ,Sooko, Mlarak dan Kecamatan Sampung sudah memenuhi standar capaian kabupaten yaitu memiliki capaian prevalensi *unmet need* dibawah capaian Kabupaten Ponorogo.

3. Analisis Kluster

Analisis kluster dilakukan menggunakan bantuan software Geoda. Analisis kluster menggunakan metode K-Means yang termasuk kedalam metode pengklusteran *non-hirarki*. Metode ini dipilih dikarenakan peneliti ingin membuat pengelompokan dengan membentuk kluster sesuai dengan jumlah kluster yang telah ditentukan dan jumlah kluster yang ideal. Sehingga dalam proses pengklusterannya nanti, jumlah kluster sudah ditentukan diawal. Penentuan jumlah kluster dilakukan menggunakan metode Elbow. Penentuan jumlah kluster dengan metode ini dilakukan dengan menghitung nilai *Sum Square*

Error (SSE) setiap kluster sesuai dengan data yang ada. Nilai SSE setiap kluster selanjutnya dibuat menjadi sebuah grafik untuk selanjutnya dicari letak



Gambar 7. Grafik *Sum of Square Error*

Berdasarkan grafik disamping, siku terbentuk antara kluster 3 dan kluster 4. Oleh karenanya, jumlah kluster yang ideal adalah 4 kluster. Setelah menemukan jumlah kluster yang ideal, selanjutnya

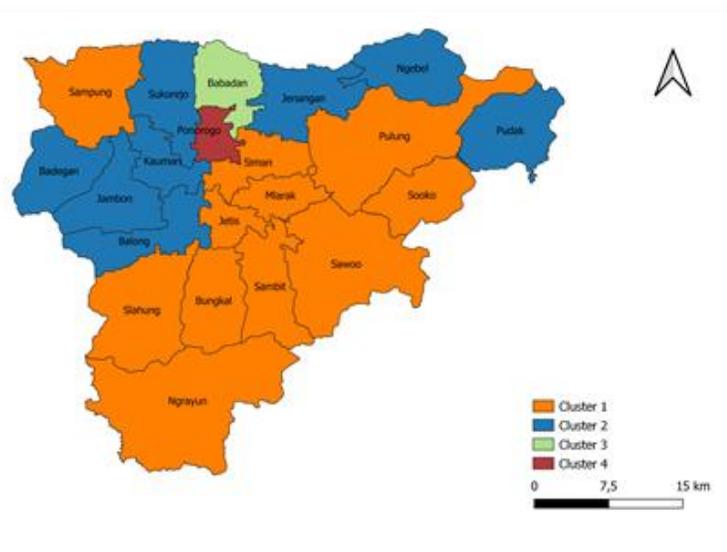
siku pada grafik tersebut berada (Fadilla et al., 2020). Berikut merupakan grafik SSE yang telah dibuat.

dilakukan analisis kluster menggunakan Geoda dengan hasil sebagai berikut.

Within-cluster sum of square	111,60
Between-cluster sum of square	1656,84

Tabel 2. Analisis Kluster dengan Geoda

Hasil analisis kluster dengan geoda menunjukkan bahwa nilai within-cluster sum of square sebesar 111,60 dan nilai between-cluster sum of square sebesar 1656,84. Dari hasil tersebut, dapat diketahui bahwa kluster yang terbentuk sudah ideal, dikarenakan nilai perbedaan antar kecamatan dalam 1 kluster kecil dan perbedaan antar kluster sangat besar. Berikut merupakan pemetaan hasil analisis kluster yang telah dilakukan.



Gambar 8. Pemetaan Hasil Pengklusteran Wilayah Berdasarkan Cakupan KB Aktif dan Prevalensi *Unmet Need*

Dari pemetaan diatas, terdapat 4 kluster yang terbentuk yaitu sebagai berikut.

1. Kluster 1

Jumlah wilayah yang masuk pada kluster 1 sebanyak 11 kecamatan yaitu Kec. Sampung, Kec. Jetis, Kec. Siman, Kec. Pulung, Kec. Sooko, Kec.

3. Kluster 3

Jumlah wilayah yang masuk pada kluster 3 sebanyak 8 yaitu Kecamatan Jenangan, Kauman, Jambon, Sukorejo, Badegan, Ngebel, Balong, Pudak

Bungal, Kec. Ngrayun, Kec. Sambit, Kec. Mlarak, Kec. Slahung, Kec. Sawoo

2. Kluster 2

Jumlah wilayah yang masuk pada kluster 2 sebanyak 1 kecamatan yaitu Kecamatan Babadan

4. Kluster 4

Jumlah wilayah yang masuk pada kluster 4 sebanyak 1 kecamatan yaitu Kecamatan Ponorogo.

Pembahasan

Berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan, cakupan KB Aktif di wilayah Kabupaten Ponorogo sudah merata (Gambar 4). Hal ini ditunjukkan dengan mayoritas kecamatan sudah memiliki capaian cakupan KB Aktif melebihi angka capaian Kabupaten Ponorogo. Meskipun mayoritas wilayah kecamatan sudah melaksanakan program KB dengan baik, namun masih terdapat beberapa wilayah kecamatan dimana program KB belum berjalan secara maksimal yang ditunjukkan dengan cakupan KB Aktif yang masih rendah. Terdapat 4 kecamatan yang perlu mendapat perhatian khusus dalam peningkatan pencapaian keberhasilan Program KB, dikarenakan pada 4 kecamatan ini masih memiliki capaian cakupan KB Aktif dibawah angka capaian Kabupaten Ponorogo. 4 Kecamatan ini adalah Kecamatan Ngebel, Kecamatan Babadan, Kecamatan Ponorogo, dan Kecamatan Sooko. Penyebab rendahnya cakupan pengguna KB Aktif dilatarbelakangi oleh banyak faktor, seperti tingkat ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, dan budaya.

Tingkat ekonomi dapat mempengaruhi keinginan PUS untuk mengikuti program KB (Rahmayanti, 2015). Keluarga dengan tingkat ekonomi menengah kebawah akan lebih mengutamakan kebutuhan primer setiap harinya dibandingkan kebutuhan lainnya seperti kebutuhan untuk ber-KB. Keluarga dengan tingkat ekonomi menengah kebawah akan lebih cenderung untuk mengesampingkan penggunaan penghasilan dalam pemenuhan kebutuhan ber-KB. Hal ini akan menyebabkan banyaknya keluarga yang tidak berpartisipasi menjadi pengguna KB Aktif dikarenakan keterbatasan ekonomi.

Selain tingkat ekonomi, tingkat pendidikan juga dapat mempengaruhi keinginan PUS untuk ber-KB (Rahmayanti, 2015). Tingkat pendidikan ini berhubungan dengan bagaimana seorang individu lebih mudah memahami dan menerima adanya informasi. Tingkat pendidikan juga akan mempengaruhi pola pikir atau pandangan seorang individu, tidak terkecuali pandangan mengenai keikutsertaan dalam Program KB. PUS dengan tingkat pendidikan yang tinggi lebih cenderung mudah memahami makna dibalik pelaksanaan Program Keluarga Berencana yaitu untuk mengontrol jumlah penduduk dan mencapai kesejahteraan keluarga, namun PUS dengan tingkat pendidikan rendah cenderung tidak menerima dan memahami makna pelaksanaan Program KB sehingga lebih berisiko untuk tidak berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap keinginan PUS untuk ber-KB adalah budaya yang terdapat di wilayah lingkungan mereka (Wilisandi & Feriani, 2020). Seringkali anggapan yang bertentangan dengan tujuan Program Keluarga Berencana seperti misalnya “banyak anak banyak rezeki” menjadi penyebab PUS tidak ingin ber-KB. Selain itu, pengaruh dari lingkungan sekitar juga akan mempengaruhi keikutsertaan PUS dalam ber-KB. Pengaruh tetangga yang memiliki dukungan negatif terhadap program KB dapat menyebabkan PUS menjadi tidak ikut serta dalam program KB dan begitupun sebaliknya. Apabila tetangga memiliki dukungan positif terhadap pelaksanaan program KB, maka akan semakin besar pula keinginan PUS untuk ikut serta dalam program KB.

Jenis metode kontrasepsi yang digunakan oleh masyarakat Kabupaten Ponorogo diantaranya adalah MKJP yang meliputi IUD, MOW, MOP, implan dan metode kontrasepsi jangka pendek meliputi kondom, pil, dan suntik. Jenis kontrasepsi yang paling diminati adalah jenis metode kontrasepsi suntik dengan persentase sebesar 39,48% yang artinya sebanyak 39,48% pengguna KB Aktif di Kabupaten Ponorogo menggunakan jenis KB suntik (Gambar 5). Jenis KB suntik merupakan jenis metode kontrasepsi jangka pendek yaitu jenis metode kontrasepsi yang kegunaannya hanya bersifat sementara atau tidak permanen. Jenis metode kontrasepsi ini memiliki tingkat efektivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan MKJP sehingga jenis ini memiliki resiko yang tinggi terhadap terjadinya *drop out*. Hal ini tentunya harus dihindari, dikarenakan apabila angka *drop out* tinggi maka akan berisiko terjadinya kelahiran yang akan meningkatkan kepadatan penduduk di suatu wilayah. Selain itu, angka *drop out* yang tinggi juga dapat menyebabkan capaian KB Aktif suatu wilayah menjadi menurun.

Sedangkan untuk jenis metode kontrasepsi MOP dan kondom menjadi jenis KB yang kurang diminati oleh masyarakat Kabupaten Ponorogo. Metode kontrasepsi yang ditujukan untuk PUS berjenis kelamin laki-laki ini masih sangat rendah penggunaannya. Prevalensi pengguna jenis metode kontrasepsi MOP dan Kondom yaitu 0,44% dan 3,54% (Gambar 5). Rendahnya pengguna jenis metode kontrasepsi ini dapat mengindikasikan bahwa masih sedikit PUS laki-laki yang berkontribusi dalam pelaksanaan Program KB dan menggunakan alat kontrasepsi. Faktor yang mempengaruhi keikutsertaan laki-laki dalam ber-KB diantaranya adalah tingkat pengetahuan tentang KB yang masih kurang, tingkat pendapatan rendah,

persepsi atau pandangan yang positif terhadap nilai anak seperti menganggap bahwa anak itu adalah berkah dsb, serta sikap negatif terhadap alat kontrasepsi misalnya takut akan resiko atau efek samping yang akan timbul akibat pemakaian (Tamtomo, 2015).

Selain cakupan KB Aktif, keberhasilan program KB juga ditunjukkan dengan prevalensi *unmet need* yang rendah. Berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan, terdapat 14 kecamatan yang memiliki prevalensi *unmet need* dibawah capaian Kabupaten Ponorogo dan terdapat 9 kecamatan yang memiliki prevalensi *unmet need* diatas capaian Kabupaten Ponorogo yaitu Kecamatan Ngebel, Kecamatan Jenangan, Kecamatan Balong, Kecamatan Ponorogo, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Kauman, Kecamatan Puduk, Kecamatan Jambon, dan Kecamatan Badegan (Gambar 6). *Unmet need* menjadi salah satu penyebab terjadinya kehamilan tidak diinginkan (Ratnaningsih, 2018). Kehamilan tidak diinginkan akan berpotensi untuk mengalami berbagai masalah kesehatan dan berdampak pada kesejahteraan keluarga. *Unmet need* dapat terjadi karena dilatarbelakangi oleh usia, dukungan suami dan pendidikan. PUS dengan kategori usia tidak berisiko (usia 20-35 tahun) apabila mengalami kehamilan cenderung tidak menggunakan KB dikarenakan pada usia ini mereka masih menginginkan anak lagi. PUS pada usia ini termasuk dalam kategori ingin memiliki anak namun ditunda, oleh karenanya mereka cenderung tidak menggunakan KB dikarenakan beberapa hal seperti misalnya takut apabila kesuburannya terganggu ketika menggunakan KB dan lain sebagainya. Sedangkan pada PUS dengan usia berisiko yaitu PUS usia <20 tahun atau >35 tahun cenderung belum ingin memiliki kehamilan atau tidak menginginkan adanya kehamilan. PUS pada usia muda memilih untuk tidak menggunakan KB dikarenakan mereka beranggapan bahwa menggunakan KB pada usia muda dapat mempengaruhi tingkat kesuburannya kelak. PUS pada usia >35 tahun memilih tidak menggunakan KB dikarenakan mereka beranggapan bahwa pada usia ini mereka tidak mungkin mengalami kehamilan. Berbagai anggapan yang muncul ini terjadi akibat masih minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat mengenai Program Keluarga Berencana. Oleh karenanya, tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan yang rendah juga menjadi faktor penyebab terjadinya *unmet need*. *Unmet need* juga dapat dipengaruhi oleh dukungan suami terhadap pelaksanaan Program Keluarga Berencana. Dukungan suami dapat berupa

pemberian motivasi, edukasi dan memfasilitasi istri untuk ber-KB.

Pemetaan hasil pengklusteran berdasarkan cakupan KB Aktif dan prevalensi *unmet need* menunjukkan bahwa Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi 4 kluster (Gambar 8). Kluster 1 memiliki rata-rata cakupan KB Aktif sebesar 67,19% dan *unmet need* sebesar 9,80%. Sehingga kecamatan yang termasuk dalam kluster 1 merupakan kecamatan yang sudah memenuhi standar capaian kabupaten baik untuk cakupan KB Aktif maupun untuk prevalensi *unmet need*. Kluster 2 memiliki rata-rata cakupan KB Aktif sebesar 57,08% dan prevalensi *unmet need* sebesar 8,26%. Kecamatan pada kluster ini merupakan kecamatan yang sudah memenuhi mencapai standar capaian *unmet need* kabupaten namun tidak memenuhi standar capaian cakupan KB Aktif kabupaten. Kluster 3 memiliki rata-rata cakupan KB Aktif sebesar 66,30% dan prevalensi *unmet need* sebesar 18,93%. Pada kluster 3 terdapat kecamatan yang rata-rata memiliki cakupan KB Aktif diatas capaian kabupaten namun tidak memenuhi standar capaian *unmet need* kabupaten. Sedangkan kluster 4 memiliki rata-rata cakupan KB Aktif sebesar 44,52% dan prevalensi *unmet need* sebesar 40,43. Kecamatan pada kluster ini merupakan kecamatan yang tidak memenuhi standar capaian kabupaten baik dalam cakupan KB Aktif maupun dalam prevalensi *unmet need*.

Berdasarkan hasil pemetaan mengenai cakupan KB Aktif dan *unmet need* yang telah dilakukan, terdapat 2 kecamatan yang berpotensi akan mengalami peningkatan jumlah penduduk pada tahun yang akan mendatang dan akan mempengaruhi kepadatan penduduk di wilayah tersebut. 2 kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Ngebel dan Kecamatan Ponorogo. Kedua kecamatan ini memiliki capaian cakupan KB Aktif dibawah capaian kabupaten dan memiliki prevalensi *unmet need* diatas prevalensi kabupaten. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan cakupan pengguna KB Aktif pada wilayah kecamatan yang masih memiliki cakupan dibawah capaian cakupan Kabupaten. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan pemberian bantuan dana bagi keluarga yang merasa kesulitan mendapat alat kontrasepsi dikarenakan keterbatasan ekonomi, pemberian wawasan mengenai alat kontrasepsi pada PUS, menjalin hubungan berupa sebuah kerjasama dengan pemangku kepentingan di wilayah setempat, melakukan pendekatan dan advokasi kepada tokoh masyarakat (Sukmaniar et al., 2018). Sedangkan upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan prevalensi *unmet need* pada suatu wilayah adalah

dengan memaksimalkan peran aktif petugas Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) maupun tenaga KB lain yang ada di suatu wilayah dalam memperkenalkan program KB kepada masyarakat. Selain itu, dapat pula dilakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya untuk ikut serta dalam Program Keluarga Berencana.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil pemetaan mengenai cakupan pengguna KB Aktif menunjukkan bahwa terdapat 4 kecamatan yang memiliki capaian cakupan pengguna KB Aktif dibawah capaian Kabupaten Ponorogo yaitu Kecamatan Ngebel, Kecamatan Babadan, Kecamatan Ponorogo, dan Kecamatan Sooko
2. Jenis metode kontrasepsi yang paling diminati PUS di Kabupaten Ponorogo adalah suntik, sedangkan jenis metode kontrasepsi kondom, MOP, dan MOW masih kurang diminati oleh PUS di Kabupaten Ponorogo
3. Hasil pemetaan mengenai prevalensi *unmet need* menunjukkan bahwa terdapat 9 kecamatan yang memiliki prevalensi *unmet need* diatas capaian Kabupaten Ponorogo yaitu Kec. Badegan, Kec. Puduk, Kec. Jenangan, Kec. Ngebel, Kec. Jambon, Kec. Ponorogo, Kec. Kauman, , Kec. Balong, dan Kec. Sukorejo
4. Pemetaan pengklusteran wilayah menghasilkan Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi 4 kluster. Kluster 1 berisi Kec. Jetis, Kec. Siman, Kec. Pulung, Kec. Bungkal, Kec. Sawoo, Kec. Ngrayun, Kec. Sambit, Kec. Mlarak, Kec. Slahung, Kec. Sooko, Kec. Sampung. Kluster 2 terdiri dari 1 kecamatan yaitu Kecamatan Babadan. Kluster 3 terdiri dari Kec. Jambon, Kec. Jenangan, Kec. Kauman, Kec. Balong, Kec. Ngebel, Kec. Badegan, Kec. Puduk, dan Kec. Sukorejo. Kluster 4 terdiri dari Kecamatan Ponorogo

Saran

Penelitian ini mengolah data menggunakan aplikasi Quantum GIS dan Geoda, diharapkan peneliti selanjutnya dapat mencoba menggunakan jenis software lainnya untuk mengolah data penelitian. Selain itu, metode pengklusteran terdiri dari banyak metode. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan jenis metode pengklusteran

yang lain agar dapat membandingkan hasilnya dan diperoleh metode pengklusteran terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2020). *Hasil Sensus Penduduk 2020*. Retrieved March 21, 2022, from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>
- BPS. (2021). *Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)*. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1976/1/laju-pertumbuhan-penduduk.html>
- BPS. (2022). *Sistem Informasi Rujukan Statistik*. <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/49>
- Dirjendukcapil. (2021). *Distribusi Penduduk Indonesia Per Juni 2021: Jabar Terbanyak, Kaltara Paling Sedikit*. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-per-juni-2021-jabar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit>
- Fadilla, R., Andarsyah, R., & Awangga, R. M. (2020). *Data analytics: Peningkatan Performa Algoritma Rekomendasi Collaborative Filtering Menggunakan K-Means Clustering* (R. M. Awanga (ed.)). Kreatif Industri Nusantara. https://www.google.co.id/books/edition/Data_analytics_peningkatan_performa_algo/JgkCEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=metode+elbow&pg=PA91&printsec=frontcover
- Rahmayanti, O. M. (2015). *Hubungan Antara Tingkat Pendidikan dan Pendapatan dengan Tingkat Partisipasi PUS dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Tahun 2015* [Universitas Negeri Semarang]. <http://lib.unnes.ac.id/23279/1/3201411034.pdf>
- Ratnaningsih, E. (2018). Analisis Dampak Unmet Need Keluarga Berencana Terhadap Kehamilan Tidak Diinginkan Di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang. *Jurnal Kebidanan*, 7(2), 80–94.
- Sukmaniar, Saputra, W., & Saputra, D. (2018). *Upaya Peningkatan Peserta KB Aktif dalam Rangka Pencapaian Target Renstra BKKBN 2015-2019 di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan*. 26, 39–50.
- Tamtomo, A. D. (2015). *KAJIAN RENDAHNYA PARTISIPASI SUAMI (PUS) SEBAGAI AKSEPTOR KB DI DESA TANJUNG SARI (JURNAL) Oleh Agung Dwi Tamtomo 2015*

Mahasiswa pendidikan Geografi Dosen Pembimbing 1 Dosen Pembimbing 2.
Universitas Lampung.

- Wilisandi, W., & Feriani, P. (2020). Hubungan Faktor Budaya dengan Perilaku Penggunaan Alat Kontrasepsi (KB) di Puskesmas Samarinda Kota. *Journal Borneo Student Research*, Vol.2 No.1(1), 8. <https://journals.umkt.ac.id/index.php/bsr/article/download/1491/669>